

# HARAPAN MASYARAKAT KEPADA POLISI

Oleh Drs. Momo Kelana \*)

## Pendahuluan

Membahas tentang harapan masyarakat kepada Polisi bukan suatu kejian yang mudah. Walaupun dapat bertitik tolak dari hakekat fungsi kepolisian yaitu menjamin hidup dan milik; penegakan dan perlindungan dari kewenang-wenangan yang ditentukan menurut hukum; menegakkan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan menurut hukum namun bentuk penyelenggaraan dan mekanismenya masih harus dikaitkan dengan tipe, bentuk dan tujuan negara sehingga dengan sendirinya masing-masing negara akan mempunyai konsepsi kepolisian yang berbeda. Bahwa konsep dasar Kepolisian ialah "untuk melindungi masyarakat", namun perlu disadari bahwa konsep dasar kepolisian harus merupakan konsep yang dinamis sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya membuahakan tuntutan dan harapan masyarakat yang senantiasa berkembang pula. Dengan demikian topik "Harapan masyarakat kepada Polisi" seharusnya dikaitkan

dengan masyarakat yang sedang mengalami gejolak perubahan pesat dan polisi yang tanggap terhadap segala perubahan tersebut.

Walaupun tidak setiap bentuk perubahan masyarakat harus ditanggapi oleh polisi namun dari pernyataan di atas setidaknya mengisyaratkan gelar kekuatan dan kesiagaan Polisi "setiap saat dan setiap tempat". Harapan masyarakat kepada polisi hari ini akan berbeda dengan kemarin dan pasti tidak sama dengan harapan kepada polisi dua puluh tahun yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dengan sendirinya merupakan upaya yang tiada pernah berhenti dan harus senantiasa dikembangkan dari waktu ke waktu. Hubungan polisi dan masyarakat dimungkinkan dalam satu bentuk pelaksanaan tugas dengan kewenang-kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kewenang-kewenangan kepolisian tersebut diberikan bukan untuk memberikan kepuasan kepada polisi, tetapi memang demikianlah karena di dalam tiap-tiap masyarakat yang berorganisasi politik terdapat apa yang dinamakan "ketertiban hukum",

\*) Penulis adalah Mayor Jenderal Polisi, Gubernur PTIK.

suatu bentuk yang sangat khas dari kontrol sosial. Oleh karena itu kewenangan formal tersebut harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pola kontrol sosial yang disepakati dengan harapan dapat secara efektif digunakan.

Mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan, penyelewengan atau kolusi oknum polisi dengan penjahat, harus dipandang sebagai akses yang berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dan tidak merupakan pola yang dikembangkan. Seorang anggota polisi yang semangatnya tinggi tetapi tidak profesional sangat mungkin mengambil jalan pintas dalam tugasnya seperti antara lain melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan walaupun mungkin maksudnya untuk mempercepat penyelesaian perkara. Contoh tersebut sangat mungkin terjadi pada jaman sebelum KUHAP sedangkan setelah berlakunya UU No. 8/81 (KUHP) penyidik tidak lagi mengejar pengakuan tetapi berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Namun walaupun hal tersebut masih terjadi, telah dapat dilihat salah satu bentuk terapinya yaitu "Peningkatan kemampuan profesi kepolisian". Di samping itu dari contoh tersebut dapat pula disimak, bahwa penyimpangan-penyimpangan dapat terjadi karena peluang yang terdapat pada sistemnya.

Dengan demikian maka apabila praktek-praktek penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan tersebut dibiarkan akan mengakibatkan merosotnya citra dan wibawa polisi. Oleh karena itu kita harus berpaling pula kepada suatu kiat rekayasa lingkungan masyarakat agar tidak memberi peluang kepada bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dengan jalan secara intensif membangun komunikasi balik dengan prinsip kemitraan antara polisi dan masyarakat.

#### **Polisi dan harapan masyarakat di Indonesia**

Memang benar bahwa upaya terus-menerus yang dilakukan dengan Polri masih belum membuahkan hasil yang diharapkan karena faktor situasi dan kondisi lingkungan baik dalam tubuh Polri sendiri maupun situasi nasional. Namun apabila ditelusuri kembali dan diperbandingkan dari waktu ke waktu terlihat juga grafik peningkatan kualitas walaupun dalam bentuk peningkatan yang landai. Sering didengar keluhan-keluhan dari masyarakat misalnya : Kesulitan menghubungi Polri, karena penerimaan petugas ; masyarakat merasa jengkel karena proses diperlambat ; sinisme masyarakat "hilang kambing lapor kepada Polisi, menjadi hilang sapi". Sebetulnya dari contoh yang dikemukakan tersebut lebih merupakan akses kasuistis dan bukan pola umum yang dianut dan dikembangkan

kan Polri. Bila secara lengkap diangkat ke permukaan, cukup banyak pula masyarakat yang merasakan kualitas pelayanan Polri yang baik namun jarang diungkapkan karena dianggap "memang sudah seharusnya begitu". "Kesulitan menghubungi Polri" seperti contoh tadi lebih ditujukan kepada "kualitas pelayanan Polri" dan kondisi tersebut ada kaitannya juga dengan tingkat kecerdasan masyarakat khususnya tingkat pemahaman terhadap polisinya. Dugaan atau keluhan bahwa berhubungan dengan Polri sama dengan mencari kesulitan, pernyataan tersebut mungkin dapat lebih dijelaskan bila dikaitkan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap polisinya serta masih adanya prasangka negatif terhadap polisi. Kesan seperti itu mungkin harus diimbangi pula dengan kesan positif seperti misalnya : polisi yang memberikan sebagian kantornya untuk para transmigran yang terlantar karena perkampungannya terbakar, atau polisi yang menolong orang terlantar dan mengusahakan ongkos untuk ke kampung halamannya.

Adanya penyelesaian di luar proses dan prosedur juga sering dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini perilaku masyarakat sendiri juga ikut mendorong terjadinya proses yang demikian. Secara intern sebenarnya tindakan-tindakan terhadap anggota yang melakukan hal seperti itu telah seringkali dilakukan tidak saja dalam bentuk tindakan

disiplin tetapi banyak juga yang diproses di pengadilan.

Dengan demikian diperlukan pula upaya-upaya penerangan dan pendidikan masyarakat secara menyeluruh terutama dalam kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Masyarakat juga merasakan trauma dengan status tahanan, bila masyarakat merasa trauma terhadap status tahanan adalah wajar karena berarti dkekang dan dirampas hak kebebasannya untuk bergerak. Namun bila dilihat dari data pra peradilan tentang kesalahan dalam penangkapan oleh Polri ternyata sangat kecil. Dari 175.862 kasus hanya terjadi Pra Peradilan sebanyak 25 dan dari jumlah itu 22 dimenangkan Polri (data tahun 1992/1993). Demikian juga dengan adanya perbedaan perlakuan dalam pelayanan oleh Polri, walaupun ada maka hal tersebut sangat berkait dengan kondisi subjektif petugas Polri yang dengan sendirinya memerlukan perhatian dan tindakan dari atasannya.

Polri sebagai unsur ABRI dengan sendirinya juga harus selalu konsisten dengan kepentingan perjuangan ABRI yaitu mempertahankan tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945 di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu Polri harus menghadapi setiap tantangan situasional dengan tetap mengkaitkannya dengan kepentingan

an nasional yang terancam. Dari contoh-contoh tentang keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat tadi, mungkin merupakan bentuk tantangan situasional yang sesuai gradasinya telah masuk dalam lingkup kompetensi ABRI. Di sini perlu diinformasikan bahwa penggunaan kekuatan Polri mempunyai dua tataran yaitu pertama tataran teknis profesi Kepolisian dengan pendekatan hukum dan metode-metode Ilmu Kepolisian dan kedua tataran tugas ABRI di mana Polri menyiapkan kekuatan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tugas tersebut.

#### **Kendala-kendala dalam upaya peningkatan citra dan wibawa Polri**

Faktor-faktor penyebab merosotnya citra Polri, sebagian faktor yang penting justeru berasal dari luar Polri. Hal tersebut wajar saja karena Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya dan dapat dikatakan sebagai salah satu produk masyarakatnya.

Beberapa judul tulisan disurat kabar menyambut Hari Bhayangkara ke-48 antara lain berbunyi :

- 1) Polri adalah pencerminan diri kita.
- 2) Ibarat bak sampah, polisi tampung segala urusan.
- 3) Polisi masih harus turun ke jalan, amankan Rambu lalu-lintas.

Bila masyarakat merasakan bahwa keadaan saat ini kedudukan pemerintah semakin kuat dalam kegiatan penyelenggaraan negara harus dipandang sebagai peluang bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian menuju kepada pencapaian tujuan masyarakat aman dan tertib berdasarkan hukum. Kalau dikatakan bahwa aturan permainan bergeser kepada kekuasaan atau kekuatan dan Polri ikut terlibat dalam aturan permainan yang tidak lagi berdasarkan hukum, maka pernyataan ini tidak lain merupakan ungkapan tentang akses yang timbul, sebab aturan permainan yang kita anut adalah berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UUD RI tahun 1945. Dalam kaitan ini relevan untuk diketengahkan kembali pernyataan Panglima ABRI dalam sambutan pada Hari Bhayangkara ke-48 yaitu :

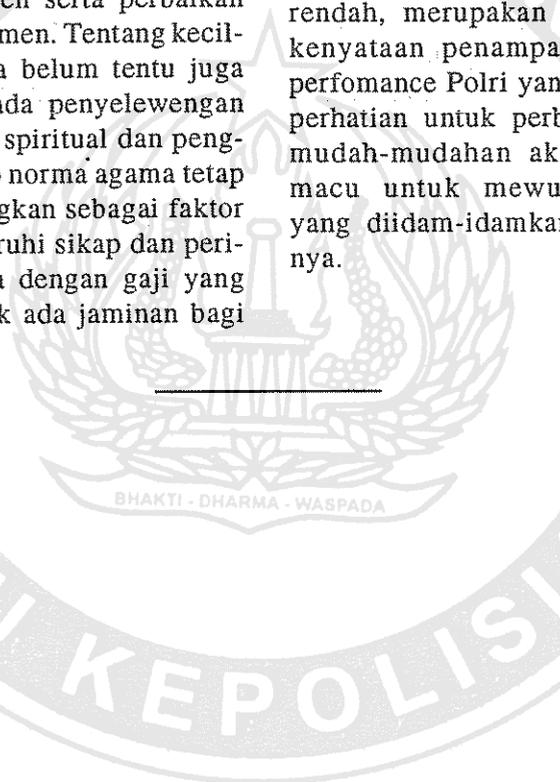
- Agar Polri dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan yang selalu didambakan masyarakat.
- Polri harus bisa tampil dalam sosok sebagai pengayom, pembimbing dan pelindung serta lebih peka lagi terhadap aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

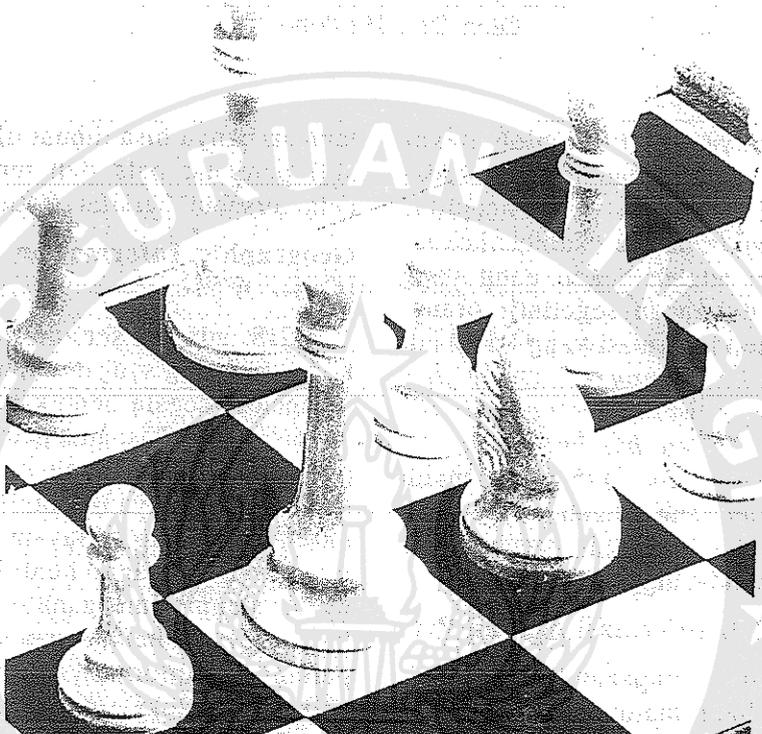
Dengan munculnya kekuatan baru yaitu kekuatan ekonomi yang mungkin akan berupaya mengkondisikan sehingga dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam hal ini perlu diwaspadai berkem-

bangnya apa yang dinamakan “White Collar Crime” dan “Corporate Crime”. Sedangkan bila ada pendapat tentang relevansi anggaran Polri dan keberhasilan tugas operasional memang benar ada kaitan korelasinya. Namun dalam hal ini kendala dana dapat pula sebenarnya diatasi dengan perbaikan metode yang lebih efektif dan efisien serta perbaikan segi-segi manajemen. Tentang kecilnya gaji anggota belum tentu juga mendorong kepada penyelewengan karena segi-segi spiritual dan penghayatan terhadap norma agama tetap harus diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Sebaliknya dengan gaji yang tinggi tetap tidak ada jaminan bagi

kejujuran apabila sendisendi agama tidak dihayati dengan baik.

Berbagai hal lain misalnya rendahnya kualitas sebagian anggota Polri, merit system yang belum berjalan sepenuhnya, keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dengan ABRI lain dan instansi penegak hukum lainnya, disiplin yang rendah, merupakan cuplikan dari kenyataan penampakan sebagian performance Polri yang memerlukan perhatian untuk perbaikannya dan mudah-mudahan akan lebih memacu untuk mewujudkan Polri yang diidam-idamkan masyarakatnya.





**100 TAHUN  
MELANGKAH  
KOKOH  
DALAM  
PERCATURAN  
BISNIS**